

Peningkatan Kapasitas Aparat Desa dan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan

Jumiati Ilham¹, Ervan Hasan Harun², Arfan Utiahman³

¹Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Gorontalo

³Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Gorontalo

e-mail: jumiatiilham@ung.ac.id¹

Article history

Received: 03-03-2023

Accepted: 05-04-2023

Published: 10-04-2023

Abstrak

Pelaksanaan Program KKN – Membangun Desa kali ini merupakan program KKN terintegrasi dengan kegiatan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang akan direkognisi ke dalam 20 SKS kegiatan akademik dan tersebar dalam beberapa mata kuliah baik yang terdapat dalam kurikulum maupun mata kuliah yang bersifat freeform. Berdasarkan hasil assesment kebutuhan masyarakat, daftar inventarisir masalah, dan daftar potensi yang ada di desa Pontolo, maka KKN MBKM – Membangun Desa Tahun 2022 mengusulkan 3 (tiga) program inti kepada pemerintah desa dan telah mendapat persetujuan yakni: 1). Pelatihan Microsoft Excel dan Penyusunan Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI); 2). Sosialisasi dan perbaikan instalasi listrik yang baik dan aman, dan 3). Pelatihan UMKM. Program KKN MBKM – Membangun Desa Tahun 2022 di desa Pontolo kecamatan Mananggu kabupaten Boalemo telah, menghasilkan:1). Aparat desa yang memiliki keterampilan dalam mengoperasikan Microsoft Excel dan juga mampu menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI); 2). Kelompok masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam membuat instalasi listrik yang baik dan aman berdasarkan dan sebanyak 43 unit rumah yang berhasil dilakukan reinstalasi (instalasi kembali) berdasarkan Pedoman Umum Instalasi Listrik (PUIL); dan 3. Kelompok masyarakat yang memiliki pengetahuan dalam mengembangkan UMKM.

Kata kunci: MBKM; membangun desa; AHSP; UMKM; instalasi listrik

Abstract

The implementation of the Community Service Program – Building Villages this time is an integrated Community Service program with Merdeka Learning - Merdeka Campus activities which will be recognized as 20 credit hours of academic activities and spread over several courses, both contained in the curriculum and freeform courses. Based on the results of an assessment of community needs, a list of inventory problems, and a list of the potential that exists in Pontolo village, the KKN MBKM – Building Villages in 2022 has proposed 3 (three) core programs to the village government and have received approval, namely: 1). Microsoft Excel Training and Preparation of Work Unit Price Analysis (AHSP) in accordance with the Indonesian National Standard (SNI); 2). Dissemination and repair of good and safe electrical installations, and 3). UMKM training. The KKN MBKM Program – Building Villages in 2022 in Pontolo village, Mananggu sub-district, Boalemo district has produced: 1). Village officials who have skills in operating Microsoft Excel and are also able to prepare a Cost Budget Plan (RAB) based on Work Unit Price Analysis (AHSP) in accordance with the Indonesian National Standard (SNI); 2). Community groups who have knowledge and skills in making good and safe electrical installations based on and as many as 43 housing units have been successfully reinstalled (reinstalled) based on the General Guidelines for Electrical Installation (PUIL); and 3. Community groups who have knowledge in developing UMKM.

Keywords: MBKM; building villages; AHSP; UMKM; electricity installation

1. PENDAHULUAN

Visi pembangunan Indonesia pada RPJMN 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat 5 (lima) arahan Presiden dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional, yaitu [1]:

1. Pembangunan Sumberdaya Manusia (SDM)

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan Kawasan produksi dengan Kawasan distribusi, mempermudah akses ke Kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua) undang-undang. Pertama UU Cipta Lapangan Kerja, dan Kedua UU Pemberdayaan UMKM

4. Penyederhanaan birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur, dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi ekonomi.

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

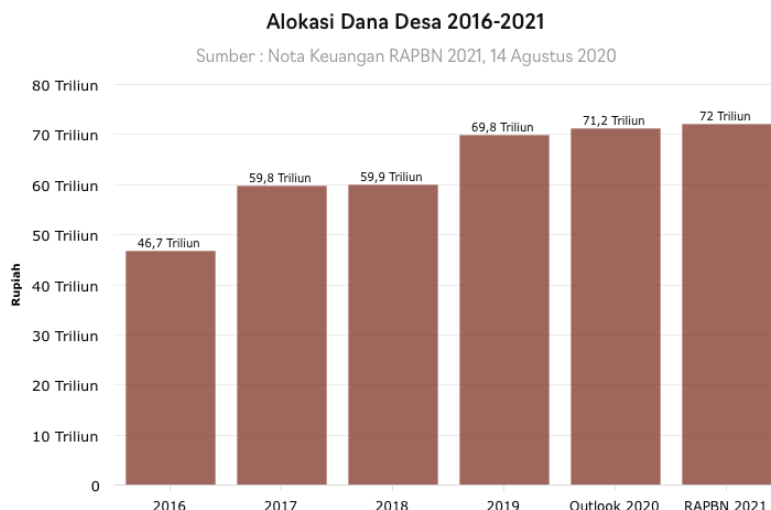
Seiring dengan alokasi dana desa yang dalam setiap tahun terus meningkat, pemerintah desa dituntut untuk terus melakukan pembenahan dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintah di tingkat desa. Sesuai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021, pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana desa sebesar Rp 72 triliun. Angka ini meningkat Rp 800 miliar atau 1,1% dibandingkan dengan outlook tahun 2020 yang sebesar Rp 71,2 triliun [2]. Peningkatan dana desa yang begitu besar ini tentunya perlu perencanaan yang matang dalam penggunaan maupun pengalokasiannya dengan tetap berpedoman pada peraturan dan perundangan yang berlaku.

Adapun arah kebijakan penggunaan dana desa 2023 sebagai berikut [3]:

a. Penyempurnaan kebijakan penganggaran DD dengan memperhatikan:

1. Kebutuhan masing-masing desa sesuai dengan kewenangan desa.

2. *Performance Based* dalam melaksanakan pengelolaan dana desa dan dukungan Desa dalam mensinergikan penggunaan dana desa sesuai kebijakan dan prioritas nasional melalui penilaian kinerja desa dalam penghitungan Alokasi Kinerja.



Gambar 1. Alokasi Dana Desa 2016 – 2021

- b. Melaksanakan pengalokasian dana desa berdasarkan formula dan pengalokasian sebagian dana desa secara terpisah pada tahun anggaran berjalan berdasarkan kriteria tertentu.
- c. Penentuan fokus penggunaan dana desa yang disinkronisasikan dengan prioritas nasional, utamanya untuk:
 1. Program pemulihan ekonomi, yaitu perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem maksimal 25%;
 2. Memberikan bantuan permodalan kepada BUMDes untuk menggerakkan perekonomian desa;
 3. Dana operasional pemerintahan desa;
 4. Dukungan program sektor prioritas di desa termasuk penanganan stunting, mendukung ketahanan pangan dan hewani termasuk pembangunan lumbung pangan desa, dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa.
- d. Memperbaiki mekanisme penyaluran dana desa melalui:
 1. Memisahkan penyaluran dana desa *earmarked* dan *non-earmarked* berdasarkan kinerja pelaksanaan;
 2. Melanjutkan penyaluran dana desa secara langsung dari RKUN ke RKD;
 3. Melanjutkan pemberian reward penyaluran dana desa dalam 2 (dua) tahap kepada desa berstatus Mandiri.
- e. Melanjutkan penerapan sanksi berupa penghentian penyaluran dana desa jika terdapat desa bermasalah atau kepala desa menyalahgunakan dana desa.

Upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat desa melalui dana desa membutuhkan peran perangkat desa sebagai perantara berjalannya program di desa yang mempunyai kemampuan dalam hal perencanaan anggaran biaya. Rencana Anggaran Biaya, atau biasa disebut sebagai RAB merupakan upaya perhitungan biaya yang dilakukan sebelum pekerjaan proyek konstruksi maupun bisnis secara umum [4]. Dari pekerjaan tersebut, pemilik proyek (*owner*) dalam hal ini pihak yang bertanggungjawab melakukan sebuah proyek mengetahui perkiraan total biaya pengerjaan proyek yang diperlukan hingga proyek selesai. Oleh karena pentingnya perencanaan anggaran biaya dalam sebuah kegiatan/pekerjaan/proyek maka dibutuhkan perangkat-perangkat desa yang mengerti bagaimana menyusun RAB yang benar [5].

Dalam rangka memenuhi fungsi perencanaan tersebut, maka perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas aparat desa melalui hilirisasi ilmu pengetahuan yang ada di Perguruan Tinggi yang akan dilaksanakan dalam Program KKN MBKM – Membangun Desa dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan penguatan kepada aparat pemerintah desa bersama masyarakat desa dalam rangka melakukan perencanaan dan evaluasi pembangunan desa.

2. Memberikan pelatihan pemanfaatan teknologi (IT) dalam penyusunan Rencana Anggaran pembangunan berdasarkan Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) yang mengacu pada Standar Nasional Indonesia.
3. Hilirisasi ilmu pengetahuan dari Perguruan Tinggi kepada masyarakat desa.

Adapun manfaat yang diharapkan dari Program KKN MBKM – Membangun Desa adalah:

1. Meningkatkan peran serta aparat pemerintah desa dan masyarakat desa dalam kegiatan perencanaan dan evaluasi pembangunan desa.
2. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan aparat desa dan masyarakat desa dalam pemanfaatan teknologi (IT) dalam rangka penyusunan rencana dan evaluasi program pembangunan desa.

2. METODE

Program KKN MBKM – Membangun Desa ini dilaksanakan selama 4 bulan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penetapan Sasaran Kegiatan Berdasarkan Kondisi Mitra
 - a. Kurangnya pengetahuan pemerintah/aparat desa dalam hal penyusunan RAB yang benar sehingga perlu dilakukan sosialisasi penyusunan RAB dan fungsi RAB dalam perencanaan pembangunan desa.
 - b. Kurangnya pemahaman pemerintah/aparat desa dalam membuat Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) sesuai dengan SNI yang berlaku atau yang terkait dengan kegiatan pembangunan sehingga perlu dilakukan pelatihan bagaimana melakukan Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) sesuai dengan SNI
 - c. Kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh pemerintah/aparat desa dalam memanfaatkan teknologi komputer (informasi) dalam mengolah data yang dibutuhkan untuk penyusunan RAB, oleh karena itu perlu dilakukan pelatihan menyusun perencanaan terutama RAB menggunakan teknologi komputer/perangkat IT sehingga tahapan perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan desa akan terlaksana secara efektif dan efisien
2. Tahapan Kegiatan
 - a. Persiapan dan Pembekalan
Mekanisme pelaksanaan persiapan dan pembekalan Program KKN MBKM – Membangun Desa kali ini meliputi tahapan sebagai berikut:
 - 1) Perekrutan Peserta
Perekrutan peserta Program KKN MBKM – Membangun Desa ini dikoordinasikan Program Studi dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNG.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat.
Dilakukan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) berkoordinasi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNG.
 - 3) Melakukan pembekalan (*coaching*) terhadap mahasiswa.
Adapun materi persiapan dan pembekalan yang diberikan kepada mahasiswa mencakup beberapa hal sebagai berikut:
 - Peran dan fungsi mahasiswa dalam Program KKN MBKM – Membangun Desa;
 - Penjelasan panduan dan pelaksanaan Program KKN MBKM – Membangun Desa;
 - Penjelasan teknis pelaksanaan kegiatan sejak berangkat ke lokasi, kegiatan selama di lokasi, peraturan dan tata tertib, monitoring dan evaluasi, pembuatan laporan/jurnal harian, rencana penarikan dan penyusunan laporan akhir.
 - b. Rencana Aksi Program
 - 1) Pengantaran Mahasiswa;
Pengantaran mahasiswa dilaksanakan sesuai jadwal yang diberikan oleh LPPM UNG. Lokasi Program KKN MBKM – Membangun Desa berada di desa Pontolo kecamatan

- Mananggu kabupaten Boalemo yang dapat ditempuh menggunakan jalur darat sepanjang 149 km dari kampus Universitas Negeri Gorontalo dengan waktu tempuh 3 jam 24 menit menggunakan kendaraan roda empat.
- 2) Pengenalan dan observasi lapangan;
Hari pertama peserta Program KKN MBKM – Membangun Desa berada dilokasi akan melakukan pengenalan dan observasi lapangan, setelah sebelumnya melakukan pengenalan dengan aparat/pemerintah desa setempat.
 - 3) Asesmen Kebutuhan Masyarakat;
Proses assesment adalah suatu tahap dalam pengembangan masyarakat yang membantu pelaksana kegiatan dalam hal ini tim pelaksana (Dosen dan Mahasiswa) untuk mengetahui apa yang ingin mereka lakukan berdasarkan pada pengetahuan tentang kondisi apa yang sudah mereka capai saat ini. Oleh karena itu, proses assesment menjadi salah satu tahapan yang tidak terpisahkan dalam suatu proses pengembangan masyarakat karena assesment diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat (termasuk di dalamnya masalah yang dihadapi masyarakat) serta potensi yang ada pada masyarakat.
 - 4) Penyampaian dan Analisa hasil asesmen kepada Pemerintah Desa;
Setelah tahap asesmen kebutuhan masyarakat selesai dilaksanakan, maka pada tahap ini dilakukan analisis berdasarkan data dan informasi yang sudah diperoleh. Selanjutnya hasil analisis ini dibuat dalam bentuk dokumen tertulis untuk dilaporkan kepada pemerintah desa.
 - 5) Penyusunan rencana Program KKN MBKM – Membangun Desa bersama Masyarakat;
Rencana program disusun bersama masyarakat dengan mengacu pada hasil analisis mengenai asesmen kebutuhan masyarakat dan juga kebijakan pemerintah desa maupun peraturan yang berlaku di masyarakat setempat (kearifan lokal).
 - 6) Monitoring;
Monitoring kegiatan dimaksudkan untuk memantau pelaksanaan kegiatan, progress kegiatan, kendala yang dihadapi, dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada. Monitoring dapat dilakukan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) maupun dari tim LPPM UNG.
 - 7) Pemaparan program kerja kepada Pemerintah Desa
Setelah rencana program selesai disusun, maka dilakukan pemaparan Program Kerja kepada pemerintah desa. Pemaparan program kerja ini juga dihadiri oleh masyarakat setempat, perangkat desa, lembaga yang ada di desa, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang akan terkait langsung dengan rencana program yang diusulkan.
 - 8) Pelaksanaan Program Kerja
Tahap ini menjadi program inti KKN MBKM – Membangun Desa. Adapun teknis pelaksanaan bergantung pada program kerja yang telah dipaparkan dan telah mendapat persetujuan dari pemerintah desa. Termasuk keterlibatan pihak-pihak yang diperlukan dalam penyelesaian program kerja.
 - 9) Evaluasi
Tahapan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan monitoring, dan dimaksudkan juga untuk menilai tingkat keberhasilan program kerja.
 - 10) Hasil kepada DPL, LPPM, Pemerintah Desa, dan Masyarakat
Tahap ini merupakan bentuk pertanggung jawaban kegiatan atau program kerja yang sudah dilaksanakan selama di lokasi.
 - 11) Penarikan Mahasiswa
Setelah semua tahapan selesai dilaksanakan, maka tahap terakhir adalah penarikan mahasiswa kembali ke kampus, untuk selanjutnya bersama Dosen Pembimbing Lapangan menyusun dokumen laporan akhir kepada LPPM UNG.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Deskripsi singkat Lokasi KKN MBKM – Membangun Desa

Program KKN MBKM – Membangun Desa Tahun 2022 ini dilaksanakan di desa Pontolo kecamatan Mananggu kabupaten Boalemo. Kecamatan Mananggu merupakan salah satu dari 7

Kecamatan di Kabupaten Boalemo yang memiliki luas wilayah 300,76 km² atau sekitar 16,48% terhadap luas total kabupaten. Secara astronomi, kecamatan Manangu berada pada 0° 23'55"- 0° 54'17" Lintang Utara dan 122° 01'12"- 122° 12'58" Bujur Timur dan secara administratif terdiri atas 9 desa yang salah satunya adalah Desa Pontolo [6].

Desa Pontolo sendiri memiliki luas wilayah 21,79 km² atau sekitar 7,25% dari luas wilayah kecamatan Manangu dan secara administratif terbagi atas 3 dusun yakni [7]:

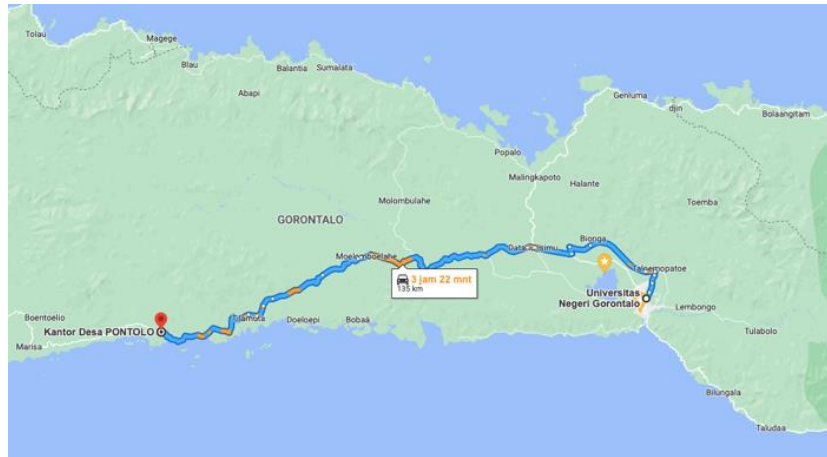
1. Dusun Pontolo
2. Dusun Polohungo
3. Dusun Bontula

Jumlah penduduk Desa Pontolo berdasarkan per Desember 2022 sebanyak 1159 jiwa atau dengan kepadatan penduduk sebesar 53 orang per km² dan terdiri atas 3 dusun sebagaimana diberikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah penduduk desa Pontolo per Desember 2022

No	Dusun	Jumlah Kepala Keluarga			Penduduk Awal Bulan Ini			Penduduk Akhir Bulan Ini		
		L	P	KK	L	P	JLH	L	P	JLH
1.	Pontolo	238	222	143	236	221	457	238	222	460
2.	Polohungo	224	200	121	224	200	424	224	200	424
3.	Bontula	149	126	84	149	126	275	149	126	275
JUMLAH		611	548	348	609	547	1.156	611	548	1.159

Dalam hal pemerintahan, Desa Pontolo dijalankan oleh aparat desa sebanyak 11 orang yang terdiri atas 6 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Dari 11 orang aparat desa, 7 orang merupakan lulusan SMA atau sederajat, dan 4 orang lainnya lulusan S-1. Jarak desa Pontolo kecamatan Manangu kabupaten Boalemo dari kampus Universitas Negeri Boalemo adalah 135 km yang dapat ditempuh menggunakan mobil dengan waktu tempuh 3 jam 22 menit seperti ditunjukkan pada Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Jarak dan waktu tempuh dari UNG ke desa Pontolo kecamatan Mananggu kabupaten Boalemo

Pelaksanaan Program KKN MBKM – Membangun Desa Tahun 2022 ini dilaksanakan selama 4 bulan. Tahapan pencapaian target dan luaran kegiatan diuraikan berdasarkan metode pelaksanaan dengan beberapa penyesuaian mengikuti kondisi yang ditemui di lapangan.

3.1. Pelaksanaan Program Kerja

Tahap ini menjadi program inti KKN MBKM – Membangun Desa Tahun 2022. Adapun teknis pelaksanaan bergantung pada program kerja yang telah dipaparkan dan telah mendapat persetujuan dari pemerintah desa termasuk keterlibatan pihak-pihak yang diperlukan dalam penyelesaian program kerja.

- 1) Pelatihan Microsoft Excel dan Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI);

Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan sebuah *enabler* yang keberadaannya diharapkan mampu mendukung jalannya proses bisnis tidak hanya pada sebuah lingkungan kerja perusahaan, tapi juga dapat diterapkan pada lingkungan kerja aparatur pemerintahan. Teknologi Informasi sangat berperan dalam peningkatan pelayanan disektor publik dan memiliki pengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah [8], dan tidak dapat dipungkiri telah memberikan sumbangan yang besar dalam peningkatan pelayanan masyarakat, khususnya pada pelayanan administrasi. Keberadaan TIK selain dapat meningkatkan pelayanan, juga dapat bermanfaat dalam pengolahan data [9]. Dalam rangka itu, maka pelaksanaan program inti ini menjadi penting bagi aparat desa sebagai pelaksana pembangunan di desa. Program inti ini dilaksanakan selama 7 kali pertemuan, dengan jadwal seperti diberikan pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Jadwal dan Materi Pelatihan Excel dan AHSP

NO	TANGGAL PELAKSANAAN	MATERI
1	28 Oktober 2022	Dasar Excel, Pengenalan Operator dan Logika
2	31 November 2022	Penggunaan Operator Aritmatika, Fungsi Dasar Excel
3	3 November 2022	Penggunaan Fungsi If (Logika Tunggal)
4	8 November 2022	Penggunaan Logika Majemuk
5	11 November 2022	Fungsi Lookup
6	17 November 2022	Fungsi Lookup Lanjutan

7	14 Januari 2023	Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI)
---	-----------------	---



Gambar 2. Foto dokumentasi Pelatihan Excel

Pelaksanaan program inti yang pertama dimulai pada tanggal 28 Oktober 2022 dengan melakukan pelatihan dasar-dasar penggunaan microsoft excel sampai dengan pelatihan Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dilaksanakan sampai dengan tanggal 14 Januari 2023 dengan mengambil lokasi di Kantor Desa Pontolo, Kecamatan Manangu, Kabupaten Boalemo.



Gambar 3. Foto dokumentasi Pelatihan Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI)

- 2) Sosialisasi dan pengecekan instalasi listrik yang baik dan aman
Kegiatan program inti yang kedua ini dilaksanakan pada tanggal 24 November berlokasi di Kantor Desa Pontolo ini dihadiri oleh masyarakat desa pontolo dan kami menghadirkan pemateri dari pihak UP3 PLN Marisa dan salah satu dosen dari Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo yang juga merupakan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) pada Program KKN MBKM – Membangun Desa Tahun 2022.



Gambar 4. Foto Dokumentasi Sosialisasi Instalasi

Kegiatan ini tidak hanya sampai pada sosialisasi, namun peserta KKN dengan dukungan partisipasi masyarakat juga melakukan perbaikan terhadap instalasi listrik yang tidak sesuai dengan Pedoman Umum Instalasi Listrik (PUIL) pada 43 unit rumah masyarakat desa Pontolo kecamatan Mananggu kabupaten Boalemo.



Gambar 5. Foto Dokumentasi Perbaikan Instalasi

3) Pelatihan UMKM.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2022 berlokasi di Desa Pontolo Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo. Program ini bertujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran serta mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah yang terdapat di desa Pontolo. Penyampaian materi yang di bawakan oleh mahasiswa peserta KKN dan juga mengundang bapak Roys Kango S.Ap selaku koordinator UMKM di kecamatan Mananggu.



Gambar 6. Foto Dokumentasi Pelatihan UMKM

4. KESIMPULAN

Dari rangkaian proses kegiatan Program KKN MBKM – Membangun Desa Tahun 2022 di desa Pontolo kecamatan Mananggu kabupaten Boalemo yang telah dilakukan, menghasilkan: 1). Aparat desa Pontolo kecamatan Mananggu kabupaten Boalemo yang menjadi mitra pada Program KKN MBKM – Membangun Desa Tahun 2022 kali ini yang memiliki keterampilan dalam mengoperasikan Microsoft Excel dan juga mampu menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI); 2). Kelompok masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam membuat instalasi listrik yang baik dan aman berdasarkan Pedoman Umum Instalasi Listrik (PUIL), dan sebanyak 43 unit rumah yang berhasil dilakukan reinstalasi (instalasi kembali) berdasarkan PUIL; 3). Kelompok masyarakat yang memiliki pengetahuan dalam mengembangkan UMKM.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) UNG yang telah memberi dukungan financial terhadap pengabdian ini melalui pendanaan PNBP UNG Tahun Anggaran 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2020). *Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2020 – 2024*. [https://www.kemendes.go.id/berita/assets/files/final_4_RENSTRA_KEMENDESA_PDTT_Tahun_2020-2024_\(21_Desember_2020\)_opt_\(1\).pdf](https://www.kemendes.go.id/berita/assets/files/final_4_RENSTRA_KEMENDESA_PDTT_Tahun_2020-2024_(21_Desember_2020)_opt_(1).pdf).
- [2] Dwi Hadya Jayani. (2020). *Alokasi Dana Desa dalam RAPBN 2021*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/08/25/berapa-alokasi-dana-desa-dalam-rapbn-2021>.
- [3] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Workshop Formulasi Pengalokasian Dana Desa Berbasis Kinerja*. <https://www.ciptadesa.com/2022/08/arah-kebijakan-dd-2023.html>
- [4] Nidaur Rahmah. (2019). *Pengertian Rencana Anggaran Biaya (RAB), RAP, dan Contoh Format RAB Pekerjaan Konstruksi*. <https://www.pengadaanbarang.co.id/2019>.
- [5] Lubis Muzaki. (2019). *Produktivitas Tenaga Kerja: Pengertian, Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, dan Manfaat Pengukuran Produktivitas*. <https://www.pengadaanbarang.co.id/2019/09/produktivitas-tenaga-kerja.html>.
- [6] Badan Pusat Statistik Kabupaten Boalemo. (2022). *Kabupaten Boalemo Dalam Angka*. <https://boalemokab.bps.go.id>.
- [7] Badan Pusat Statistik Kabupaten Boalemo. (2020). *Kecamatan Mananggu Dalam Angka*.

- <https://boalemokab.bps.go.id>.
- [8] Sirwan. (2020). Pelatihan Dasar TIK untuk Meningkatkan Kemampuan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Administrasi Desa. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 8(1), 25-30.
- [9] Purba, H., Sukmawati, A., Muhammad Hifdzi Adini, & Delsika Pramata Sari. (2018). Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Lingkungan Pemerintahan Desa di Kecamatan Sungai Pandan. *Jurnal Bisnis Dan Pembangunan*, 7(1).